

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, terletak pada 6° LU- 141° LS. Berada di antara Asia dan Australia serta dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia memiliki iklim tropis dengan hanya dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh arah angin muson dari arah barat dan timur, sehingga musim dapat berubah. Dikarenakan adanya pergantian musim yang teratur, Indonesia memiliki potensi tanah yang subur karena dua musim tersebut. Hal ini didukung oleh paparan sinar matahari dan curah hujan yang memadai setiap tahunnya.

Selain pengaruh dari garis khatulistiwa terhadap iklim di Indonesia, kondisi geografis negara ini yang terdiri dari 17.508 pulau memiliki lima pulau utama, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap pulau memiliki ciri khas topografi yang berbeda-beda. Wilayah dataran rendah, seperti yang terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, memiliki tanah yang luas dan subur, memungkinkan untuk budidaya padi, sayuran, umbi-umbian, dan kacang-kacangan dengan mudah. Di daerah pegunungan, seperti Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, hasil pertanian lebih banyak berupa sayuran, buah-buahan, dan hortikultura. Sektor pertanian masih tetap menjadi sektor pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di dalam negeri. Sebagian besar penduduk Indonesia menjalani profesi sebagai petani karena luasnya lahan yang tersedia

Tabel 1.1 Jumlah Pekerja berdasarkan lapangan pekerjaan

No	Bidang Pekerjaan	Nilai/ Pekerja (orang)
1	Pertanian, perhutanan, perikanan	40.635.997
2	Perdagangan besar-eceran	25.800.553
3	Industri pengolahan	18.671.926
4	Akomodasi-makan-minum	9.635.433
5	Konstruksi	8.188.425
6	Jasa pendidikan	6.626.638
7	Jasa lainnya	5.892.267
8	Transportasi-pergudangan	5.710.510
9	Administrasi Pemerintahan	4.633.405
10	Jasa Kesehatan	2.384.745
11	Jasa Perusahaan	1.940.203
12	Tambang dan Galian	1.587.978
13	Jasa Keuangan	1.512.007
14	Informasi dan Komunikasi	1.097.558
15	Pengadaan Air	534.247
16	Real Estate	450.519
17	Pengadaan listrik dan gas	309.484

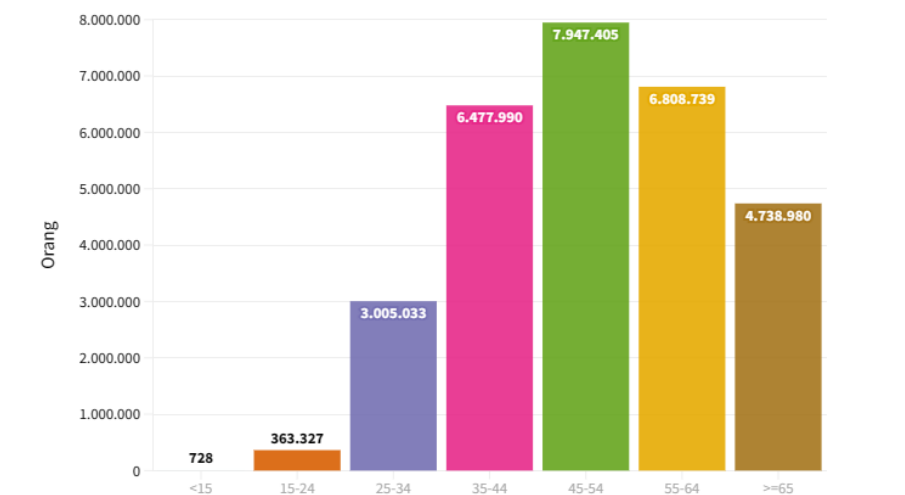
Sumber: Jumlah Pekerja berdasarkan lapangan pekerjaan (BPS, Februari 2022)

Pada Februari 2022, ada 40,64 juta orang yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Di negara-negara agraris seperti Indonesia, pertanian memainkan peran yang sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta memajukan sektor sosial, ekonomi, dan perdagangan. Selain itu, sektor pertanian memiliki banyak manfaat, termasuk menjaga sumber daya alam, memberikan kehidupan dan penghidupan, dan menciptakan lapangan pekerjaan (Ufira Isbah & Rita Yani Iyan, 2016)

Luas daerah pedesaan dengan luas perkotaan di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup besar. Pada luas wilayah daerah pedesaan umumnya lebih lebar dibandingkan dengan luas daerah perkotaan, namun jumlah penduduk di wilayah perkotaan lebih padat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini

terjadi karena daya tarik perkotaan baik dari segi infrastruktur dan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga orang lebih banyak melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan.

Mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani terdapat di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena pada daerah pedesaan lahan pertanian masih banyak dan luas, selain itu kondisi geografis di daerah pedesaan mendukung untuk bercocok tanam. Sedangkan pada daerah perkotaan letak geografisnya lebih beragam dan tidak selalu cocok untuk dijadikan sebagai perkembangan sektor pertanian. Mayoritas penduduk pada daerah perkotaan bekerja pada bidang penyedia jasa karena pada daerah perkotaan merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan.



Gambar 1. 1 Jumlah pengelola usaha pertanian

Sumber: Usia Petani di Indonesia (BPS,2023)

Dari Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 jumlah pengelola usaha pertanian perorangan di Indonesia sebanyak 29,34 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu

sebanyak 31 juta orang. Mayoritas usia petani di Indonesia paling banyak di dominasi usia 45 tahun keatas sebanyak 19,49 juta orang. Jumlah petani yang berusia sekitar 35-44 tahun sebanyak 6,48 juta orang. Petani dengan usia 25-34 tahun sebanyak 3 juta petani. Jumlah petani di tanah air yang masuk kelompok umur 15-24 tahun sebanyak 363.327 orang. Menurut jenis kelaminnya 85,58% petani di dalam negeri merupakan laki-laki dan sebanyak 14,42% petani berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan data yang disajikan, minat generasi muda terhadap industri pertanian mengalami penurunan yang signifikan. Ini disebabkan oleh gagasan bahwa bekerja pada industri pertanian adalah pekerjaan yang sulit dan kurang menjanjikan. Banyak generasi muda berminat mencari pekerjaan dibidang lainnya yang dianggap lebih menjanjikan, salah satunya pada era digital saat ini banyak generasi muda mengikuti perkembangan teknologi dan lebih tertarik pada pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi (Abdul Mutolib & Candra Nuraini, 2022) Faktor lainnya yang mempengaruhi minat generasi muda adalah faktor gengsi bekerja pada sektor pertanian dan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap profesi petani menjadikan generasi muda kurang berminat dengan profesi ini (Arvianti dkk., 2019).

Minimnya minat dari generasi muda dalam bidang pertanian akan menimbulkan kekhawatiran yang serius. Apabila problem ini tidak segera diselesaikan, keberadaan pekerja dari kalangan muda tidak akan mencukupi untuk menjaga kelangsungan produksi makanan yang dilakukan oleh para petani senior saat ini, baik karena pensiun maupun meninggal dunia. Menurunnya produksi

pangan akan terjadi karena tidak ada petani baru yang mengambil alih peran generasi sebelumnya, sehingga akan berdampak pada kesetimbangan antara permintaan dan penawaran pangan di pasar lokal dan global. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan ekonomi, dan perkembangan industri pengolahan makanan, permintaan akan pangan terus meningkat. Untuk sementara, dalam waktu dekat, masalah ini dapat diatasi dengan melakukan impor untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan, namun untuk jangka panjang, hal ini bukanlah alternatif yang optimal.

Seharusnya, keunggulan suatu negara bisa meningkat jika kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi. Negara yang mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian bagi warganya, akan memiliki dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Sayangnya, di Indonesia, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung pasokan pangan masih dilakukan secara manual oleh para lansia. Hal ini kurang efisien dan berdampak pada produktivitas. Lebih ironisnya, ketertarikan generasi muda terhadap pertanian menurun karena dianggap sebagai sektor yang penuh dengan risiko. Ketertarikan generasi muda untuk tidak terlibat dalam pertanian banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti risiko usaha tani tinggi, pendapatan usaha tani, lingkungan sosial, teknologi pertanian dan situasi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk membuat sektor pertanian menjadi lebih menarik bagi generasi muda, sehingga produktivitas pertanian bisa meningkat. (Abdul Mutolib & Candra Nuraini, 2022)

Sebagai petani, mereka harus menghadapi banyak masalah mulai dari sektor budidaya, sarana produksi, dan lainnya, serta input yang diperlukan untuk

menghasilkan output tanaman seperti benih, pupuk, dan pestisida (Ade Firmansyah Tanjung dkk., 2020) Perawatan tanaman seperti pemberian pupuk penting dilakukan untuk mendapatkan hasil tanaman yang bagus dan unggul. Permasalahan yang sering berhubungan dengan pupuk meliputi kelangkaan pupuk. Pemerintah telah menyediakan subsidi pupuk untuk para petani namun masih belum menyelesaikan permasalahan tentang kelangkaan pupuk Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan pupuk dibandingkan dengan ketersediaan yang rendah di tingkat pengecer, penjual, dan distributor, sehingga menyebabkan kenaikan harga pupuk yang signifikan (Gusti dkk., 2022).

Kehidupan petani dicirikan oleh perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran. Pengeluaran perlu dilakukan secara harian, mingguan, atau terkadang digunakan dalam situasi mendesak, seperti keadaan darurat atau kematian atau selamatan. Hasil produksi hanya diberikan kepada petani setiap musim. Petani juga menghadapi harga jual yang rendah di tingkat petani saat panen tiba. Ketergantungan petani pada tengkulak. Petani tidak mendapatkan banyak keuntungan karena tengkulak biasanya membeli hasil panen mereka Dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

Rendahnya tingkat kesejahteraan yang di dapatkan petani tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena sektor pertanian menjadi salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan ekonomi dan pemerintahan. Upaya dalam meningkatkan produksi subsektor tanaman pangan dengan cara mempertahankan luas lahan tanam yang ada dan tidak melakukan alih fungsi terhadap lahan tanman, meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan menjaga stabilitas harga (Dahiri,

2022). Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian menggabungkan tiga program: Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Gerakan Tigas Kali Ekspor (Gartieks), dan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kosntra Tani), Menurut Menteri Pertanian pada wawancara yang dilakukan pada 25 Desember 2022:

“Ketiganya harus saling terkait demi terwujudnya kesejahteraan petani, Tentu kita bisa bekerja dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, jejaring dan kerjasama yang kuat. Dengan begitu, akses informasi terkait potensi komoditas ekspor di masing-masing daerah terbuka lebar dan memiliki tujuan ekspor yang bisa diakses melalui aplikasi peta potensi ekspor dan IMACE (Indonesia Maps of Agriculture Commodities Export” (Sumber: [UPLAND Project - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian](#), diakses pada 19 Desember 2023)

Pemerintah terus berusaha untuk mendorong petani lokal dan generasi muda untuk menggunakan teknologi pertanian yang dapat membantu metode bertani serta meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan dan menyediakan bantuan berupa peralatan pertanian canggih sehingga petani mampu menggunakan dan mengaplikasikannya kedalam pertanian di desa. Dengan adanya teknologi pertanian yang dikembangkan dan diperkenalkan kepada petani dapat meningkatkan produksi pangan.

Lahan pertanian sangat luas di Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Suarabanyuurip.com, Helmy Elisabeth dikonfirmasi melalui Subkoordinator Tanaman Pangan, Ida Yuliastuti mengatakan:

“Bojonegoro masih memiliki luasan lahan pertanian 83.917 hektare yang tersebar di 28 Kecamatan”

(Sumber: <https://suarabanyuurip.com/2023/10/20/lima-kecamatan-di-bojonegoro-memiliki-luasan-lahan-pertanian-sempit/#:~:text=Kepala%20Dinas%20Ketahanan%20Pangan%20dan,yang%20tersebar%20di%2028%20kecamatan> diakses pada 19 Desember 2023)

Keadaan Geografis Bojonegoro utamanya didominasi oleh sektor pertanian karena ciri tanahnya yang berbukit di sisi selatan (Gunung Kapur Selatan) dan utara (Gunung Kapur Utara) yang terjepit oleh dataran rendah yang mengikuti jalur sungai Bengawan Solo. Situs web bojonegorokab.go.id menjelaskan bahwa elevasi tanah di Kabupaten Bojonegoro relatif rendah, berkisar antara 25 hingga 500 meter di atas permukaan laut, dan kecuraman rata-ratanya kurang dari 2%. Hal ini menyebabkan Kabupaten Bojonegoro memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, kondisi ini sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Selain itu, karena sebagian besar wilayah Bojonegoro dilalui oleh aliran sungai Bengawan Solo, ini memberikan dampak positif yang besar terhadap sektor pertanian.

Kabupaten Bojonegoro dijuluki sebagai “lumbung pangan” karena peran strategisnya dalam produksi pangan di Jawa Timur. Menurut data BPS tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil padi kering ketiga dengan hasil panen mencapai 701.42 ribu ton, setelah Kabupaten Ngawi dengan hasil padi sebanyak 738,59 ribu ton.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam usaha untuk memastikan kemandirian dan kesejahteraan petani di wilayahnya, telah menginisiasi Program Petani Mandiri. Inisiatif terbaru ini merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, kegagalan panen, risiko bencana alam, dampak globalisasi, dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

mengadopsi undang-undang ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kondisi sosio-ekonomi petani (Dendi Darmanto & Badrudin Kurniawan, 2022)

Petani adalah prioritas utama Bupati Anna Mu'awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto untuk program Petani Mandiri. Petani dapat menerima bantuan berupa hibah modal dalam bentuk barang kebutuhan pertanian, seperti pupuk, bibit, alat, dan mesin pertanian. Secara keseluruhan, program petani mandiri meningkatkan akses petani terhadap modal dan teknologi, memberikan jaminan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Petani yang ingin mendapatkan manfaat dari adanya Program Petani Mandiri (PPM) harus terdaftar sebagai pemegang Kartu Petani Mandiri (KPM). Kartu ini diberikan kepada keluarga petani dengan memenuhi persyaratan undang-undang dan digunakan sebagai identitas dan penanda identitas. Selain itu, kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan akses ke fasilitas Program.

Program ini ditujukan kepada petani Bojonegoro, baik yang memiliki tanah atau menggarap sawah; ini mencakup petani padi, sayur, sawah, dan ladang. Petani akan menjadi lebih produktif dan mandiri, dan produk pertanian akan menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, sektor pertanian masih dominan di Bojonegoro daripada sektor perindustrian, menjadikannya salah satu lumbung pangan nasional. Beliau menyatakan, menurut Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperiaker) Kabupaten Bojonegoro:

“Luas areal lahan pertanian mencapai 83 ribu hektare. Sehingga, rata-rata penduduk Bojonegoro bermata pencaharian sebagai petani. Beliau juga

menambahkan sebanyak 310.388 penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan menempati pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Bojonegoro. Sementara di urutan kedua ada mata pencaharaan bidang jasa sebanyak 159.647 penduduk, bidang perdagangan 117.354 penduduk dan buruh 114.723 penduduk” (Sumber: <https://suarabanyuurip.com/2022/06/03/mata-pencaharian-penduduk-bojonegoro-didominasi-dari-pertanian/> diakses pada 19 Desember 2023)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 mengenai Program Petani Mandiri, serta Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Program Petani Mandiri adalah ketentuan hukum yang mengatur inisiatif petani mandiri. Perubahan dalam Peraturan Bupati didasarkan pada beberapa alasan, seperti keharusan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyempurnaan peraturan, adaptasi terhadap keadaan lokal, penambahan atau pengurangan ketentuan, serta klarifikasi atau penjelasan.

Keuntungan dari Program Petani Mandiri ini dapat dinikmati dengan memenuhi sejumlah syarat. Calon penerima harus terdaftar sebagai anggota sebuah Kelompok Tani di wilayah setempat, memiliki atau mengantongi Kartu Petani Mandiri (KPM), calon penerima harus menjadi kepala keluarga yang tidak pernah menerima bantuan secara terus-menerus dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan bersedia menandatangani surat pernyataan yang menegaskan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Petani yang belum memiliki Kartu Petani Mandiri untuk menerima bantuan dari program ini dapat meminta pembuatan KPM dengan memenuhi kriteria berikut: a) Kepala keluarga petani yang memiliki tanah dan/atau yang menanam

tanaman padi, buah-buahan, dan sejenisnya; b) Kepala keluarga petani yang memiliki tanah lebih dari 2 hektar; dan c) Kepala keluarga petani yang tinggal di wilayah tersebut dengan menyertakan Surat Pernyataan Kepala Keluarga Petani Mandiri. g) Status kepemilikan, pengolahan, dan luas tanaman yang dikelola.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang SDM dan Pembiayaan, DKPP Bojonegoro, Yuni Arba'atun yang dilaksanakan pada Kamis, 13 Oktober 2022 beliau menjelaskan bahwa:

“Tahun 2022 ini ditargetkan untuk 504 kelompok Tani dan sampai September 2022 sebanyak 365 kelompok tani telah merealisasikan bantuan hibah PPM. Selain itu tercatat kelompok tani penerima bantuan hibah PPM pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sejumlah 1608 kelompok tani dengan jumlah petani pemegang KPM yang mendapatkan manfaat sejumlah 136.743 Kepala Keluarga Tani” Jelas Kepala Bidang SDM dan Pembiayaan, DKPP Bojonegoro, Yuni Arba'atun (Sumber: [DKPP Bojonegoro Salurkan PPM, Tahun 2022 Target 504 Kelompok Tani Penerima Manfaat - Bojonegoro.com](#)- 16 Januari 2024)

Manfaat dari adanya Program Petani Mandiri diantaranya: manfaat yang pertama adalah bantuan modal yang berasal dari hibah berupa subsidi barang berupa alat-alat pertanian, bibit unggul dan pupuk dibawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Manfaat kedua yaitu, akses pelatihan dan pengembangan usaha tani yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bertani dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISNAKER). Manfaat ketiga dari adanya Program Petani Mandiri adalah pemberian asuransi gagal panen kepada petani yang tujuannya adalah melindungi petani dari kerugian yang disebabkan kegagalan panen oleh Dinas Pertanian. Keuntungan keempat adalah penyediaan beasiswa kepada anak-anak petani yang

menjadi bagian dari kelompok tani, dengan fokus pada mahasiswa dengan persyaratan dan ketentuan khusus yang dianungi oleh Dinas Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus bekerja sama dengan semua dinas yang terlibat dalam program Petani Mandiri untuk memastikan bahwa petani mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Kerangka mendasar yang harus dibangun untuk mencapai tujuan adalah koordinasi antara peserta program petani mandiri. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISNAKER), Dinas Pendidikan, dan petani yang terlibat dalam program menjalankan program KPM. Kolaborasi antarlembaga terkait dan tim yang solid diperlukan agar program petani mandiri berjalan dengan baik, efisien, dan produktif.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui program petani mandiri. Dalam artikel yang diterbitkan di [Kominfo.jatimprov](http://kominfo.jatimprov.go.id) oleh Helmy Elisabeth, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, yang disiarkan melalui program SAPA! (Selamat Pagi), disebutkan bahwa:

“Program Petani Mandiri memberikan dampak positif, KPM memberikan akses petani untuk mendapatkan bantuan benih dan pupuk melalui kelompok tani. Sejak 2019 hingga 2022, sekitar 1.570 kelompok tani telah menerima bantuan hibah benih dan pupuk. Selain itu KPM memberikan perlindungan asuransi usaha tani bagi petani yang menghadapi kendala seperti banjir, kekeringan dan serangan hama/penyakit. Saat ini sudah tercatat sekitar 193.065 KPM petani yang mengalami gagal panen dapat mengajukan klaim asuransi dengan Nilai klaim mencapai Rp 6.000.000,00 perhektar kalau gagal panen”

(Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkab-bojonegoro-terus-dukung-petani-tingkatkan-produktivitas> diakses pada 17 Januari 2024)

Kecamatan Sumberejo merupakan daerah yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki hasil pertanian yang tinggi. Berdasarkan pada data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro luas lahan sawah di Kecamatan Sumberrejo mencapai 5274 Ha dengan lahan irigasi seluas 3686 Ha dan luas lahan tadah hujan 1588 Ha. Lahan sawah sebagian besar ditanami padi, sedangkan pada lahan kering ditanami berbagai jenis tanaman hortikultura seperti cabai, jagung, kacang panjang dan bawang merah.

Kecamatan Sumberejo memiliki potensi yang besar untuk memperoleh manfaat program petani mandiri Kabupaten Bojonegoro. hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya produktivitas pertanian di Kecamatan Sumberejo. Program petani mandiri dapat dirasakan jika petani terdaftar sebagai pemegang kartu petani mandiri (KPM) dan tergabung dalam kelompok tani desa.

Dikutip dari kamus Webster, Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Implement*. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Secara umum, implementasi merupakan pelaksanaan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Fitri Nur Awalliyah., 2020). David C korten mengatakan bahwa terdapat tiga parameter yang bisa dimanfaatkan guna menguji implementasi suatu program.

Indikator yang pertama adalah program. Indikator program mencakup berbagai elemen yang menyusun rancangan dan pelaksanaan program tersebut, seperti tujuan, sasaran, strategi, serta kegiatan yang direncanakan. Pada konteks Program Petani Mandiri, indikator ini mencerminkan sejauh mana program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik petani di Kecamatan Sumberrejo. Selain itu, indikator program juga mengukur kesiapan sumber daya yang tersedia, baik dari segi finansial, material, maupun manusia, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi. Dengan memfokuskan pada indikator program, penelitian ini berusaha mengevaluasi bagaimana perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi dapat mendukung tercapainya tujuan program dalam memberdayakan petani dan meningkatkan produktivitas serta pendapatan mereka.

Definisi program petani mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan petani dilihat dari kondisi yang terpenuhi seperti pada sektor ekonomi yang dapat dinilai dari peningkatan hasil panen, kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan pangan dan akses terhadap sumber daya. Program petani mandiri juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan manfaat berupa beasiswa pendidikan bagi anak dari keluarga pemegang kartu petani mandiri. Penelitian ini akan mengkaji terkait kontribusi Program Petani mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Sumberrejo berdasarkan beberapa indikator.

Efek yang dirasakan oleh petani dari adanya hibah pupuk dan benih terbantunya dari segi permodalan yang dilekuarkan oleh petani. Pupuk yang diberikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produksi dan

stabilitas pertanian sebagai komoditas utama. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berusaha untuk memastikan ketersediaan pupuk melalui program subsidi.

Selain memberikan bantuan berupa subsidi pupuk, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memberikan beasiswa yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga petani yang memiliki Kartu Petani Mandiri (KPM). Beasiswa ini diberikan untuk membantu anak petani dalam meneruskan ke pendidikan ke strata 1. Dalam pemberian besaran beasiswa yang didapatkan sesuai dengan besaran UKT yang dibayarkan tiap semester dengan melengkapi beberapa berkas untuk proses pencairan bantuan. Namun dalam pelaksanaan program terdapat beberapa manfaat yang belum sepenuhnya terlaksana secara merata. Pada pelatihan dalam rangka pengembangan petani masih terdapat beberapa daerah yang belum merasakan manfaat ini.

Indikator kedua adalah pelaksana program. Indikator pelaksana mencakup kualitas dan kapabilitas pihak yang bertanggung jawab menjalankan program. Dalam pelaksanaan program petani mandiri diampu oleh Dinas terkait sesuai dengan tanggung jawab dan juknis yang berlaku. Pada manfaat Hibah bantuan pupuk dan benih serta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berada dibawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk manfaat beasiswa pendidikan dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan. Pelatihan kepada petani berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jaminan pembelian hasil padi berhubungan dengan BUMdes Kecamatan.

Indikator ketiga adalah kelompok sasaran, untuk memperoleh manfaat dari adanya program petani mandiri adalah petani harus memiliki Kartu Petani Mandiri dengan mendaftarkan diri sebagai calon pemegang KPM dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Berdasarkan wawancara singkat dengan Bapak Samuji Ketua Poktan Desa Karangdowo pengajuan untuk mendapatkan Kartu petani Mandiri lebih mudah karena ada petugas Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang membantu dalam proses pengajuan Kartu Petani Mandiri. Berikut ini merupakan data terkait dengan jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Sumberrejo

Tabel 1. 2 Data kelompok petani di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani	Luas Lahan (Ha)	Luas Tanam (Ha)
1	Sambongrejo	6	716	290	870
2	Margoagung	5	507	197	591
3	Tulungrejo	4	454	172.24	516.72
4	Prayungan	3	295	153.29	459.87
5	Mlinjeng	4	599	281.58	844.74
6	Wotan	4	573	264.91	794.73
7	Sumberharjo	7	893	480	960
8	Banjarejo	3	606	222.31	444.62
9	Tlogohaji	6	1200	551.23	1653.69
10	Sendangagung	2	314	163.14	489.42
11	Kedungrejo	3	462	262.8	788.4
12	Ngampal	6	1158	496	1488
13	Talun	2	172	66.39	199.17
14	Bogangin	2	188	74.79	224.37
15	Karangdowo	4	587	248.812	854.436
16	Pejambon	3	253	117.09	351.27
17	Deru	3	316	168.5	505.5
18	Pekuwon	4	616	320	960
19	Sumuragung	5	418	172.05	516.15
20	Sumberrejo	3	243	127.3	381.9

21	Jatigede	2	403	150.99	452.97
22	Kayulemah	8	587	333.23	999.69
23	Mejuwet	2	187	79	237
24	Butoh	5	475	201	603
25	Karangdinoyo	5	642	283	849
26	Teleng	2	436	232.8	582.245

Sumber: BPP Kecamatan Sumberrejo, 2024

Kecamatan Sumberrejo merupakan Kecamatan rawan serangan tanaman.

Serangan hama terjadi pada musim hujan biasanya terjadi di bulan November sampai April, curah hujan yang tinggi dan kelembaban udara meningkat. Kondisi ini mempercepat pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit tanaman. Faktor utama penurunan produksi hasil pertanian banyak disebabkan oleh serangan hama atau OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), terutama tikus wereng dan jenis OPT lainnya yang berpengaruh pada produksi tanaman. Selain itu, Ketidaktahuan petani tentang strategi pengendalian hama dan penyakit yang tepat, termasuk ketidakpahaman tentang penggunaan pestisida sesuai dengan aturan yang berlaku, menyebabkan kurangnya pemahaman dalam hal ini dapat mengakibatkan kegagalan panen dan menurunkan tingkat produktivitas tanaman dan akan mempengaruhi produksi tanaman (Sosiologi Pertanian dan Agribisnis dkk., 2022). Akibat dari fenomena ini jumlah subsidi yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat masih belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan petani.

Dari penjabaran di atas maka dapat di amati bahwa satu sisi petani mulai merasakan manfaat dari program petani mandiri, tetapi di sisi lain, mereka masih menghadapi beberapa hambatan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Program Petani Mandiri di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro berdasarkan jenis program yang digunakan, organisasi yang mengelola

program, dan kelompok sasaran yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Fokus penelitian ini adalah para petani padi dan perkebunan di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, baik pemilik lahan maupun penggarap. Penulis menciptakan judul **“Implementasi Program Petani Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan informasi yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan program petani mandiri dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan aspek-aspek terkait implementasi program petani mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pendalaman analisis dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bahan literatur kepustakaan sebagai bahan kajian dalam penelitian yang sejenis, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Dapat menjadi acuan bagi instansi untuk melakukan evaluasi dalam hal pelaksanaan Program Petani Mandiri di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. sehingga hasil penelitian sedikit maupun banyak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan terkait program yang telah dilaksanakan.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat menambah wawasan bagi penulis tentang Implementasi Program Petani Mandiri di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
- b. Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur